



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJAR**



KATA PENGANTAR

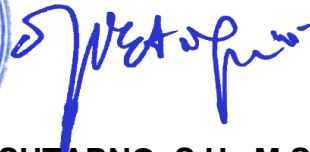
Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Banjar yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian good governance dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mendorong akuntabilitas kinerja kearah terwujudnya pemerintah yang baik dan terpercaya, maka Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Diharapkan perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

Banjar, 14 Maret 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjar,




ASEP SUTARNO, S.H., M.Si.
Pembina IV/A
NIP. 19680805 200604 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DinasPerhubungan	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN.....	42
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	42
3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan.....	43
3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bidang Perhubungan.....	44



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	45
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	60
BAB V PENUTUP	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjar	28
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Banjar	34
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	40
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjar serta Prakiraan Maju Tahun 2024	47
Tabel 4.1 Kerangka Kerja dan Pendanaan Daerah.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan, rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa : *failling to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

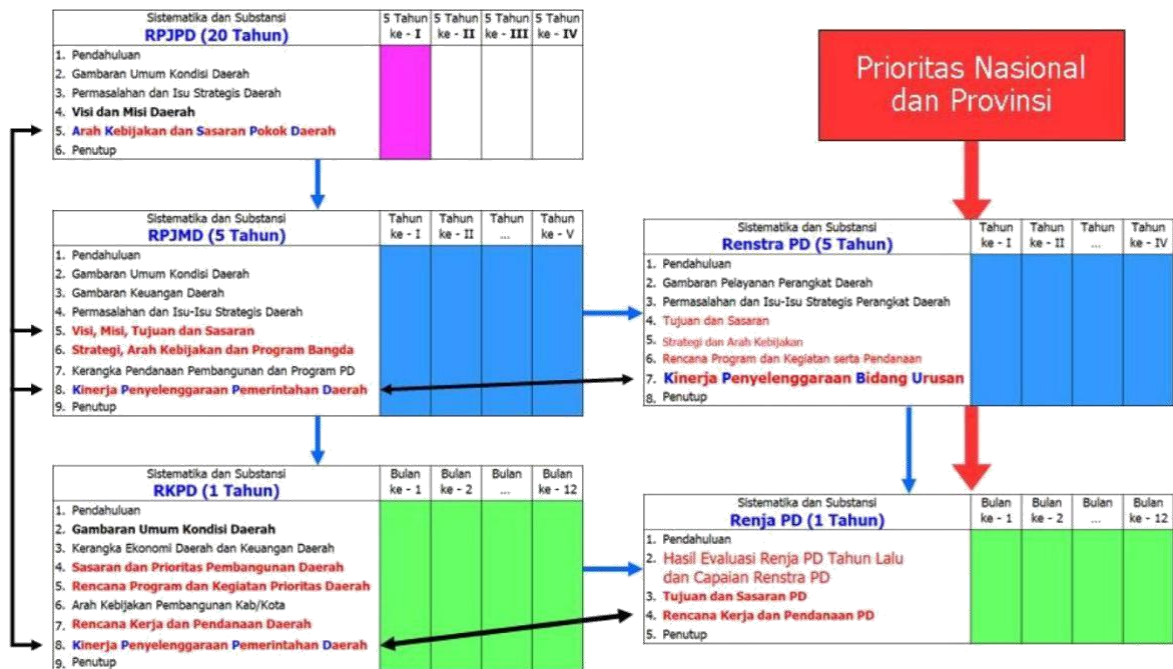
1

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah. Rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.





Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

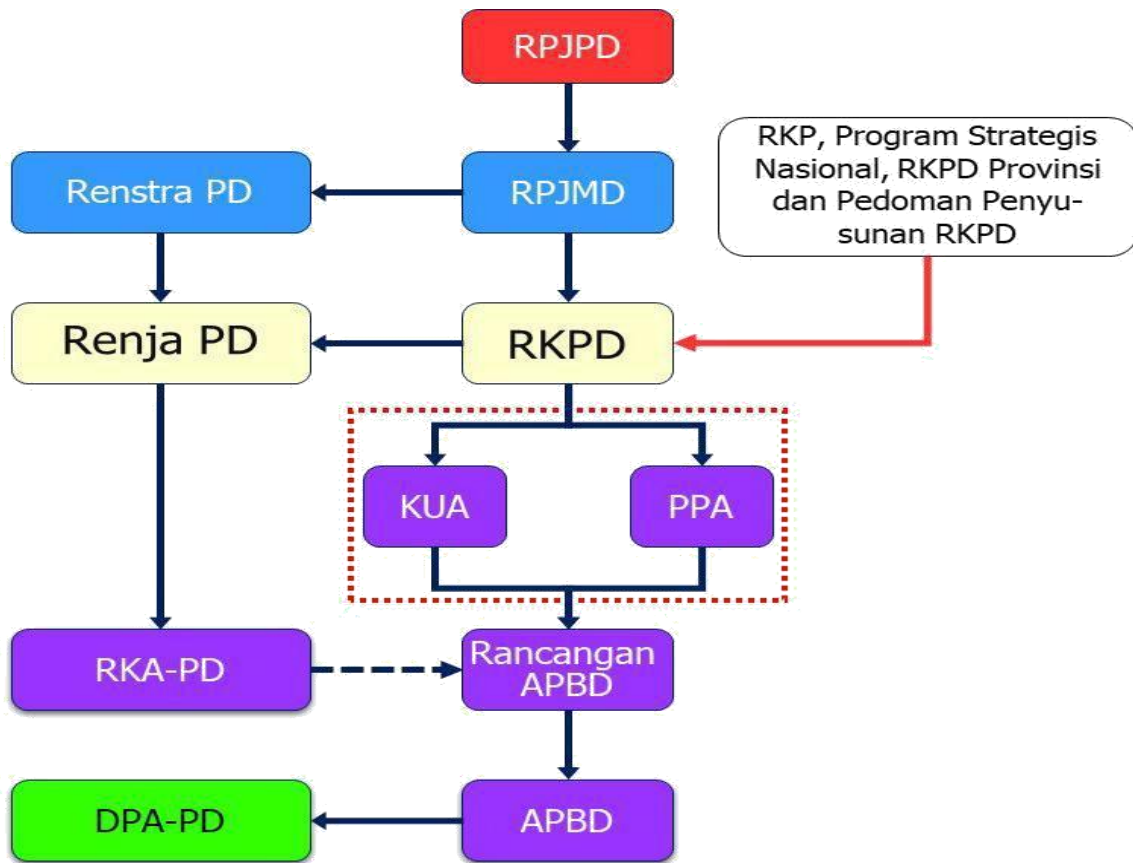
Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rencana Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan;
3. Penyusunan rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD dan Rencana Awal RKPd;



4. Pembahasan rancangan Renja PD dalam forum PD atau lintas PD untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan dokumen Renja PD dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD



1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Banjar disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (covid- 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
28. Peraturan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
32. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
33. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;
34. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);
35. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
36. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
37. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa;
38. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud



Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2024 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2024 ini adalah : menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Banjar ditahun 2024;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap Rancangan



Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah (program strategis daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan, yaitu program pembangunan daerah (program strategis daerah) dan program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja
 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%, pencapaian target sebesar 50%. Faktor tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak terakomodirnya 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengadaan Mebel dikarenakan adanya refocusing anggaran. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) *Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 2 unit, terealisasi atau tercapai 100%.*
 - b) *Pengadaan mebel, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 1 paket, tidak terealisasi atau tercapai 0%.*



2. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota sebesar 100%, pencapaian target sebesar 0,00% atau tidak tercapai. Faktor tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak terakomodirnya sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota dikarenakan adanya refocusing anggaran. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) *Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 1 dokumen, tidak terealisasi atau tercapai 0%.*

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir sebesar 100% pencapaian target sebesar 0,00%. Faktor tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak terakomodirnya 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dikarenakan adanya refocusing anggaran. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :



- a) *Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 4 kali, tidak terealisasi atau tercapai 0%.*
 - b) *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 1 dokumen, tidak terealisasi atau tercapai 0%.*
- b. Realisasi Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja :
- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 61,83, pencapaian target sebesar 100%. Dengan demikian kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen atau tercapai 100%.*
 - b) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen atau tercapai 100%.*
 - c) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target kinerja sub kegiatan sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen atau tercapai 100%.*
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target



Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu sebesar 100%, pencapaian target sebesar 100%. Dengan demikian kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja sub kegiatan sebesar 648 orang/bulan, terealisasi 648 orang/bulan atau tercapai 100%.*
- b) *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan target kinerja sub kegiatan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%.*
- c) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target kinerja kegiatan sebanyak 2 dokumen, terealisasi 2 dokumen atau tercapai 100%.*

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100%, pencapaian target sebesar 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan target kinerja sebanyak 54 stel, terealisasi sebanyak 54 stel atau tercapai 100%*
- b) *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja sebanyak 2 orang, terealisasi sebanyak 2 orang atau tercapai 100%.*

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target kinerja Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar



100%, pencapaian target sebesar 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja sebanyak 10 jenis, terealisasi sebanyak 10 buah atau tercapai 100%*
- b) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja sebanyak 10 jenis, terealisasi sebanyak 10 jenis atau tercapai 100%.*
- c) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja sebanyak 10.000 liter, terealisasi sebanyak 10.000 liter atau tercapai 100%.*
- d) *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target kinerja sebanyak 1000 set, terealisasi sebanyak 1000 set atau tercapai 100%.*
- e) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja sebanyak 360 buku, terealisasi sebanyak 360 buku atau tercapai 100%.*
- f) *Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target kinerja sebanyak 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau tercapai 100%.*
- g) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau tercapai 100%.*

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target kinerja Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%, pencapaian target 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :



- a) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja sebanyak 100 buah, terealisasi sebanyak 100 buah atau tercapai 100%*
 - b) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja sebanyak 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau tercapai 100%.*
 - c) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja sebanyak 48 orang/bulan, terealisasi sebanyak 48 orang/bulan atau tercapai 100%.*
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan target kinerja Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sebesar 100%, pencapaian target 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja sebanyak 20 buah, terealisasi sebanyak 20 buah atau tercapai 100%*
 - b) *Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja sebanyak 4 buah, terealisasi sebanyak 4 buah atau tercapai 100%.*
 - c) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja sebanyak 10 buah, terealisasi sebanyak 10 buah atau tercapai 100%.*
 - d) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan target kinerja sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit atau tercapai 100%.*



7. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota sebesar 100%, pencapaian target 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) *Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja sebanyak 5 buah, terealisasi sebanyak 5 buah atau tercapai 100%*
 - b) *Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan target kinerja sebanyak 16 unit, terealisasi sebanyak 16 unit atau tercapai 100%.*
8. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja Persentase pelayanan uji berkala sebesar 100%, pencapaian target 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) *Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target kinerja sebanyak 1500 unit, terealisasi sebanyak 1500 unit atau tercapai 100%.*
 - b) *Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target kinerja sebanyak 1500 buah, terealisasi sebanyak 1500 buah atau tercapai 100%.*
 - c) *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan target kinerja sebanyak 2 unit, terealisasi sebanyak 2 unit atau tercapai 100%.*



9. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota sebesar 100%, pencapaian target 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) *Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja sebanyak 5 kali, terealisasi sebanyak 5 kali atau tercapai 100%.*
- b) *Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja sebanyak 5 kali, terealisasi sebanyak 5 Kali atau tercapai 100%.*
- c) *Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja sebanyak 2 kali, terealisasi sebanyak 2 kali atau tercapai 100%.*

10. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan sebesar 100%, pencapain target 100%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) *Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota, dengan target kinerja kegiatan sebanyak 2 kali, terealisasi 2 kali atau tercapai 100%.*

c. Realisasi program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja :



Tidak ada program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja.

- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program / kegiatan.

Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran yang memadai sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Bahwa terdapat capaian program / kegiatan yang belum memenuhi target disebabkan karena adanya beberapa kegiatan / sub kegiatan yang terimbas refocusing anggaran.

- e. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Perhubungan.

Dikarenakan tidak tercapainya target pada 3 (tiga) kegiatan, sehingga hal tersebut mempengaruhi capaian target kinerja RENSTA Dinas Perhubungan.

Untuk mencapai target kinerja RENSTRA yang telah ditetapkan, maka diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.

- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor pencapaian target.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut :

1. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
2. Efisiensi alokasi belanja
3. Penambahan alokasi pagu anggaran

Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021, sebagai berikut :



Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja OPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100 %	100 %	100%	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %	100%	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dok	2 dok	100%	2 dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 dok	1 dok	100%	1 dok		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 dok	2 dok	100%	2 dok		



	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	100%	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji			54 orang	54 orang	100%	54 orang		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2 dok	2 dok	100%	2 dok		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	100 %	100%	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			110 stel	110 stel	100%	110 stel		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2 orang	2 orang	100%	6 orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	100%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 jenis	50 jenis	100%	50 jenis		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			10000 liter	10000 liter	100%	10000 liter		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			100 set	100 set	100%	100 set		



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			360 buku	360 buku	100%	360 buku		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan fasilitasi Kunjungan Tamu			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	100%	100%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 unit	2 unit	100%	1 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100 buah	100 buah	100%	100 buah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			816 orang / bulan	816 orang / bulan	100%	816 orang / bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100%	100%		



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20 unit	20 unit	100%	20 unit		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel			4 unit	4 unit	100%	4 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			10 unit	10 unit	100%	10 unit		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab			1 unit	1 unit	100%	1 unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota			A-C	A-C	100%	A-C		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			100 %	100 %	100%	100%		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			5 unit	5 unit	100%	5 unit		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pelihara			16 unit	16 unit	100%	116 unit		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelayanan uji berkala			100 %	100 %	100%	100%		
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi			1500 unit	1500 unit	100%	1500 unit		



	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1500 buah	1500 buah	100%	1500 buah		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara			1 unit	1 unit	100%	1 unit		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota			100 %	100 %	100%	100%		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			6 kali	6 kali	100%	6 kali		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota			6 kali	6 kali	100%	6 kali		
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota			2 kali	2 kali	100%	2 kali		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			100 %	100 %	100%	100%		



	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota			2 kali	2 kali	100%	2 kali		
--	--	---	--	--	--------	--------	------	--------	--	--



Dari penjelasan diatas, proyeksi Realisasi Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar s/d Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai 100%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat tercapai 100%
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat tercapai 100%
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat tercapai 100%
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat tercapai 100%
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat tercapai 100%
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat tercapai 100%

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dapat tercapai 100%
- 2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat tercapai 100%
- 3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dapat tercapai 100%
- 4) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dapat tercapai 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2023 didukung oleh 50 orang PNS dan 73 orang tenaga Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

Data PNS Menurut Golongan

Unit Kerja	Golongan								Jumlah
	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	



Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Sekretariat	-	-	4	-	6	-	1	-	11
Bid. LLAJ	-	-	12	1	13	-	-	-	26
Bid. Prasarana	-	-	3	-	9	-	-	-	12
Jumlah	-	-	19	1	28	-	2	-	50

Sedangkan pegawai Non PNS yang ada pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Sarana & Prasarana Dinas Perhubungan

Unit Kerja	Ketugasan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat	Subag Umum & Kepegawaian	3	4	7
	Subag Perencanaan & Keuangan	1	2	3
	Tenaga Kebersihan	4	-	4
Bid. LLAJ	Seksi Lalu Lintas	24	7	31
	Seksi Angkutan	1	1	2
	Pengujian Kendaraan Bermotor	7	1	8
Bid. Prasarana	Prasarana dan Keselamatan	10	2	12
	Seksi Keselamatan	2	-	2
	Seksi Pengembangan	4	-	4
JUMLAH		56	17	73

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan telah membuat inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut adalah : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Satu Jam Dengan Profesional atau disingkat menjadi "PANJI KERAJAAN". Inovasi ini melayani masyarakat dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. Sesuai dengan nama inovasi pelayanan publik ini, maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor paling lama hanya membutuhkan waktu 1 (satu) jam saja. Dari mulai pendaftaran sampai dengan keluarnya tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. Inovasi tersebut akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga masyarakat



pengguna pelayanan publik bidang perhubungan akan terlayani dengan maksimal.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 antara lain sebagai berikut :

- a. Jumlah arus penumpang angkutan umum dengan formula penghitungan yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum (bis) yang keluar / masuk daerah selama 1 tahun.
- b. Rasio ijin trayek dengan formula penghitungan yaitu perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 tahun terhadap jumlah penduduk.
- c. Jumlah uji kir angkutan umum dengan formula penghitungan yaitu jumlah uji kir angkutan umum selama 1 tahun.
- d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dengan formula penghitungan yaitu jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang ada.

Sedangkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor : 18.b tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar untuk urusan bidang perhubungan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan KIR. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- c. Meningkatnya keselamatan pengguna jalan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Banjar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	RPJMD	Target Renstra Dishub				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (th n-3)	Tahun 2019 (th n-2)	Tahun 2020 (th n-1)	Tahun 2021 (th n)	Tahun 2019 (th n-2)	Tahun 2020 (th n-1)	Tahun 2021 (th n)	Tahun 2022 (th n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LAKIP Dinas Perhubungan				61,53	61,63	61,73	61,53	62,63	61,73	63,83	
2	LKD sesuai dengan SAP			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
3	Persentase jumlah sarana prasarana perhubungan yang tersedia dengan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Banjar			47,20%	47,53%	47,87%	48,20%	47,53%	47,87%	48,20%	48,53%	
4	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 untuk target nilai LKIP Dinas Perhubungan dengan target 61,83 dapat terealisasi sebesar 64,45 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Untuk target Persentase jumlah sarana prasarana perhubungan yang tersedia dengan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Banjar dengan target sebesar 48,20% dapat tercapai dengan realisasai 48,20% atau 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota yang terus meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, membawa dampak terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Hal ini juga membawa dampak terhadap pola pergerakan baik orang maupun barang. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kota Banjar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dibidang perhubungan memiliki peran yang sangat penting dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perhubungan.

Tolok ukur dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjar.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 81 tahun 2011 tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar diantaranya :

- a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
- c. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
- d. Fasilitas Perlengkapan Jalan
- e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Beberapa Capaian kinerja tahun 2022 di Dinas Perhubungan Kota Banjar yang perlu menjadi catatan, diantaranya pada indikator :

A. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota

Indikator : Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota



Realisasi capaian tahun 2022 untuk indikator ini adalah 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tidak dapat memenuhi target karena adanya refocusing anggaran serta tidak adanya sumber dana lain yang mendukung baik itu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan gubernur.

B. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota.

Indikator : Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Realisasi capaian tahun 2021 untuk indikator ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian sudah memenuhi target.

C. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator : Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Realisasi capaian tahun 2021 untuk indikator ini adalah 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tidak memenuhi dari target karena adanya refocusing anggaran.

D. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator : Persentase pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

Realisasi capaian tahun 2021 untuk indikator ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

E. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota.

Indikator : Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota.

Realisasi capaian tahun 2021 untuk indikator ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan terdapat permasalahan dan hambatan yang ditemui. Permasalahan yang ada pada Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi warning light yang mengalami kerusakan ringan hingga rusak berat di 27 titik lokasi sebesar 50% dengan 4 titik lokasi milik Pemerintah Daerah Kota Banjar;



2. Tidak adanya terminal Tipe C untuk pengelolaan angkutan perkotaan (angkot);
3. Penerbitan izin trayek angkot yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya;
4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan kota sehingga menimbulkan penyempitan badan jalan dan tidak tertatanya jalan di perkotaan;

Berdasarkan permasalahan di Bidang Perhubungan menunjukkan bahwa belum optimalnya pelayanan bidang tersebut. Upaya yang musti dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan Melakukan perbaikan/rehabilitasi pada warning light kewenangan Pemerintah Kota Banjar dan mengajukan perbaikan/rehabilitasi warning light kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang provinsi) atau melalui usulan langsung ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Melaksanakan pembangunan terminal Tipe C di beberapa titik sehingga pengelolaan dan pendataan angkutan umum dari jumlah angkutan hingga izin trayek dapat dilaksanakan, Pembangunan/penyediaan sarana parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan atau oleh swasta sehingga dapat terorganisir dan tidak menimbulkan kesemrawutan.

Sedangkan hambatan yang ada antara lain :

1. Masih kurangnya pengalokasian dana untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang mendukung kinerja Dinas Perhubungan;
2. Belum optimalnya koordinasi antar dinas, badan, lembaga lainnya terutama dalam hal penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Banjar sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2019-2023.

Dalam penyusunan Renja pada Dinas Perhubungan Kota Banjar selaras dengan Tujuan Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar antara lain :



1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Membangun Perkeonomian Masyarakat Yang Maju dan Inklusi
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
4. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Banjar
5. Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan
6. Meningkatkan Ketentraman Ketertiban Masyarakat serta Kewaspadaan Bencana

Keterkaitan antara Rencana Pembangunan daerah Kota Banjar tahun 2024-2026 dengan Dinas Perhubungan Kota Banjar yaitu meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang memuat sasaran meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas

Dengan meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, diharapkan dapat mewujudkan misi yang diemban yaitu terciptanya ketertiban lalu lintas, tersedianya kendaraan angkutan umum dan angkutan barang laik jalan, sehingga berdampak pula pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan meliputi:

1. Belum optimalnya koordinasi dan konsultasi dengan Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, para pengusaha angkutan barang dan penumpang dan atau bentuk kemitraan dengan pihak ketiga yang ada di Kota Banjar maupun luar Kota Banjar guna peningkatan pelayanan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas;
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan jasa angkutan;
6. Belum maksimalnya pelayanan jasa angkutan;
7. Belum tertatanya jalur angkutan umum;
8. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan angkutan umum untuk melaksanakan uji kelayakan dan kelaikan kendaraan;



Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan Dinas Perhubungan meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Letak Kota Banjar yang cukup strategis sebagai kota transit;
3. Masyarakat sangat membutuhkan ketertiban berlalu lintas dan pelayanan jasa angkutan yang maksimal, sehingga peningkatan kualitas pelayanan dan penambahan sarana dan prasarana perhubungan harus mendapat perhatian dan penanganan yang optimal;

Untuk menghadapi tantangan serta pemanfaatan peluang yang ada guna pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu dirumuskan formulasi isu-isu strategis. Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Melengkapi perlengkapan jalan seperti traffic light, warning light, marka jalan, shelter, RPPJ serta rambu-rambu lalu lintas lainnya.
- b. Melakukan perawatan fasilitas perhubungan yang ada secara periodik.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.
- d. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap pelayanan angkutan umum.
- e. Melakukan pembenahan terhadap sistem perparkiran.
- f. Mengikutsertakan diklat teknis staf di bidang perhubungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap mereview rancangan awal RKPD dilaksanakan dengan cara membandingkannya dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini perlu dilakukan agar penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Renja dapat mengakomodir semua kebutuhan serta selaras dengan rencana program dan kegiatan prioritas pada rancangan awal RKPD.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2024
Kota Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Banjar	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.512.478.437	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Banjar	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.512.478.437	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	26.580.445	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	26.580.445	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.055.632	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.055.632	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.685.211	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.685.211	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.830.166	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.830.166	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah DPA-SKPD	1 dokumen	1.968.546	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah DPA-SKPD	1 dokumen	1.968.546	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.698.389	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Banjar	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.698.389	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	4.190.510	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	4.190.510	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4.151.991	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4.151.991	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.699.115.961	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.699.115.961	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjar	Jumlah ASN penerima Gaji	50 orang	5.696.329.383	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjar	Jumlah ASN penerima Gaji	50 orang	5.696.329.383	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2.786.578	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2.786.578	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	30.410.089	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	30.410.089
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjar	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diasuransikan	5 unit	30.410.089	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjar	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diasuransikan	5 unit	30.410.089
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	-
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	-
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	214.639.473	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	214.63.473
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118 stel	153.819.296	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118 stel	153.819.296
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 orang	60.820.177	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 orang	60.820.177
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	482.757.114	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	482.757.114
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjar	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	5.068.348	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjar	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	5.068.348
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjar	Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 jenis	107.364.338	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banjar	Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 jenis	107.364.338
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjar	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 jenis	39.180.358	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjar	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 jenis	39.180.358
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 buah	7.855.940	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjar	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 buah	7.855.940
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100 set	61.206.385	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100 set	61.206.385
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Banjar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 buku	12.164.035	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 buku	12.164.035
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Banjar	Cakupan pelaksanaan fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	25.341.740	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Banjar	Cakupan pelaksanaan fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	25.341.740



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjar	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	201.102.377	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjar	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	201.102.377	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	20.473.592	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	20.473.592	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	71.673.031	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	71.673.031	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	40.197.575	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	40.197.575	
	Pengadaan Mebel	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Mebel	10 unit	31.475.455	Pengadaan Mebel	Kota Banjar	Jumlah Pengadaan Mebel	10 unit	31.475.455	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.476.961.233	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.476.961.233	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 buah	5.048.075	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 buah	5.048.075	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	328.226.222	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	328.226.222	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73 orang/bulan	1.143.686.937	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	816 orang/bulan	1.143.686.937	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	510.341.092	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	510.341.092	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 unit	339.680.689	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20 unit	339.680.689	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Banjar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 unit	5.068.348	Pemeliharaan Mebel	Kota Banjar	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 unit	5.068.348	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	18.793.435	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	18.793.435	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	146.798.620	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	146.798.620	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kota Banjar				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Kota Banjar				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Banjar			8.356.651.125	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Banjar			8.356.651.125	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	100%		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	100%		



	Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 dokumen		Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 dokumen		
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1 dokumen		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1 dokumen		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	100%	7.186.188.223	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	100%	7.186.188.223	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	5 unit	6.694.437.148	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	5 unit	6.694.437.148	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	116 unit	491.751.405	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Banjar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	116 unit	491.751.405	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Banjar	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	60.820.177	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Banjar	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	60.820.177	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 kali	30.410.089	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 kali	30.410.089	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 dokumen	30.410.089	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 dokumen	30.410.089	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase pelayanan uji berkala	100%	209.347.104	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase pelayanan uji berkala	100%	209.347.104	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi	1500 unit	30.410.089	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi	1500 unit	30.410.089	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 buah	57.296.661	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1500 buah	57.296.661	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	7 unit	121.640.354	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	7 unit	121.640.354	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	100%	839.065.025	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	100%	839.065.025	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk		Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan	12 kali	152.050.443	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk		Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan	12 kali	152.050.443	



	Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	6 kali	651.536.146	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	6 kali	651.536.146
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	1 kali	35.478.437	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	1 kali	35.478.437
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	100%		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota		Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	100%	
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		Jumlah Penilai Andalalin yang memiliki kompetensi	1 orang		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		Jumlah Penilai Andalalin yang memiliki kompetensi	1 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Jumlah dokumen Penilaian Hasil Andalalin	4 dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Jumlah dokumen Penilaian Hasil Andalalin	4 dokumen	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	4 dokumen		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah Dokumen Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	4 dokumen	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	60.820.177	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	60.820.177
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	2 kali	30.410.089	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	2 kali	30.410.089
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 kali	30.410.089	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 kali	30.410.089
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	30.410.089	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	30.410.089
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4 kali	30.410.089	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4 kali	30.410.089



Berdasarkan tabel diatas, pada dasarnya Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Rancangan Awal RPD Kota Banjar Tahun 2023 telah mengakomodir hampir semua kebutuhan, namun ada beberapa kegiatan yang menurut analisis kebutuhan perlu diprioritaskan, antara lain :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 direncanakan untuk tahun 2024.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, sebagai bahan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang perparkiran di Kota Banjar dan sebagai sarana pembinaan juru parkir di Kota Banjar.
3. Sub Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota, guna mendukung terwujudnya ketertiban berlalu lintas di Kota Banjar.
4. Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota, guna mendukung terwujudnya ketertiban berlalu lintas di Kota Banjar.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 disamping usulan bidang teknis Perhubungan juga merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Banjar.

Oleh karena itu Dinas Perhubungan akan mengkaji dan menambah usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang terangkum melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat kota secara umum sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Untuk lebih rincinya usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Banjar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Langensari	Pemasangan/ pembangunan rambu-rambu lalu lintas	1 paket	Musrenbang & Pokir
		Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Langensari	Pemasangan/ pembangunan marka jalan	1 paket	Musrenbang & Pokir
		Kecamatan Pataruman	Pemasangan Roller Barrier	1 titik	Musrenbang & Pokir
		Kecamatan Pataruman, Kecamatan Banjar	Perlintasan Sebidang (Palang Pintu Kereta)	2 titik	Usulan Banprov
		Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, kecamatan Purwaharja, Kecamatan Langensari	Lampu jalan / penerangan jalan umum	1 paket	Musrenbang & Pokir
2	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Ruas Jalan di Kota Banjar	Pengawasan dan pengamanan lalu lintas	1 kawasan	Musrenbang & Pokir



Dari tabel diatas, dapat diuraikan usulan program dan kegiatan masyarakat yang terangkum melalui Musrenbang antara lain :

1. Usulan pengadaan rambu sebanyak 1 paket yang merupakan usulan dari seluruh kecamatan.
2. Usulan Pengadaan marka jalan sebanyak 1 paket yang merupakan usulan dari Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langensari.
3. Usulan Pemasangan Roller Barrier sebanyak 1 titik yang merupakan usulan dari Kecamatan Pataruman.
4. Usulan pengawasan kawasan tertib lalu lintas yang merupakan usulan dari Pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Banjar.

Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara umum telah sesuai dengan rencana kerja Dinas yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar.

Usulan-usulan kegiatan masyarakat yang dianggap prioritas disinkronkan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banjar. Adapun prosesnya yaitu dengan melaksanakan musrenbang tingkat desa / kelurahan dimana hasil musrenbang tingkat desa / kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan musrenbang Desa / Kelurahan. Kemudian dari tingkat desa / kelurahan dilanjutkan dengan musrenbang tingkat Kecamatan dan hasilnya di tuangkan juga dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan-usulan masyarakat yang telah di godok sampai dengan tingkat Kecamatan disempurnakan sebagai bahan rancangan Renja yang kemudian dibahas pada forum OPD tingkat Kota sehingga dihasilkan Berita Acara Hasil Kesepakatan forum OPD.

Usulan-usulan yang telah disepakati merupakan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjar dan mendukung dalam peningkatan pelayanan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar yang telah disesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Pada saat ini Penanganan Pandemi Covid dinilai berhasil dengan menurunnya angka kematian dan angka positif terpapar covid 19. Pemerintah mulai menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dimana masyarakat diperbolehkan melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas usaha, hal ini mulai mendorong begeraknya Pertumbuhan ekonomi. Yang tadinya tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020 dan 2021.

Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan dimana Pemerintah sudah menetapkan program, target, dan *major projects* di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 dan 2021 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Arah kebijakan dalam kegiatan pada Tahun Rencana masih tetap pada arah pembangunan yang berkelanjutan melalui kegiatan dalam memfasilitasi pembangunan di bidang perhubungan.



3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia :

Visi Kementerian Perhubungan :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH”

Misi Kementerian Perhubungan :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Sedangkan program prioritas pembangunan nasional perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan.



3.1.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bidang Perhubungan

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka ditetapkan visi Dinas Perhubungan Jawa Barat yaitu:

TERWUJUDNYA SISTEM PERGERAKAN YANG HANDAL DAN EFISIEN

Pertama : Sistem pergerakan yang handal adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau dan efektif, menjangkau seluruh daerah di Jawa Barat serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua.

Kedua : Sistem pergerakan yang efisien adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi secara efisien dan dengan harga yang terjangkau serta ramah lingkungan dan dilayani oleh SDM yang profesional serta dapat mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua.

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut di atas, maka terdapat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS.
2. MENGEMBANGKAN PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP YANG HANDAL
3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT YANG EFISIEN
4. MENINGKATKAN JANGKAUAN PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA YANG TERINTEGRASI
5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI YANG AKUNTABEL

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu : "Meningkatnya profesionalisme



sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat lancar dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa Barat.
2. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu.
3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.
4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.
5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan Jawa Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Tujuan dan Sasaran Renja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Renja OPD didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama perhubungan di Kota Banjar.

Adapun rumusan tujuan dari penyusunan renja ini sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 – 2026 yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah adalah :

“Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kota yang Berkualitas”

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk



mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Banjar sehingga tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2024-2026 dapat tercapai.

Faktor utama disusunnya program dan kegiatan dalam Renja ini adalah antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar dan Dinas Perhubungan Kota Banjar.
2. Pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjar dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi Dinas Perhubungan Kota Banjar.
3. Pencapaian SPM;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

Pada rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2023, yang dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1, Dinas Perhubungan Kota Banjar akan melaksanakan 2 (*dua*) program, 16 (*enam belas*) kegiatan, dan 47 (*empat puluh tujuh*) sub kegiatan yang berlokasi tersebar se-Kota Banjar sebaran di setiap bidang dengan Kebutuhan Dana Total sebesar Rp. 16.899.129.562,- (*enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta serratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*) yang terdiri dari Sumber Dana APBD Kota.

Jika rumusan program dan kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan rancangan awal RPD, maka tentu saja akan sulit untuk melakukan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Baik itu pencapaian target-target pada visi misi Pemerintah Kota Banjar maupun pencapaian target-target pada Renstra Dinas Perhubungan.

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut :



TABEL 3.1
Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Prakiraan Maju
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJAR
TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Lembar dari

Sasaran	Berdasarkan Permendagri 90/2019 (Nomenklatur Baru)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan								Nilai LKIP		62,03				62,03	
								LKD sesuai SAP		1 dok				1 dok	
	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjar	100%	8.512.478.437			100%	8.530.562.234
	2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	26.580.445	APBD Kota	Renja	100%	26.636.912
	2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	2 dokumen	8.055.632	APBD Kota	Renja	2 dokumen	8.072.746



	2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	2.685.211	APBD Kota	Renja	1 dokumen	2.690.915
	2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	2.830.166	APBD Kota	Renja	1 dokumen	2.836.178
	2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	1.968.546	APBD Kota	Renja	1 dokumen	1.972.728
	2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	2.698.389	APBD Kota	Renja	1 dokumen	2.704.121
	2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	4.190.510	APBD Kota	Renja	2 dokumen	4.208.104
	2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	4 dokumen	4.151.991	APBD Kota	Renja	4 dokumen	4.169.423
	2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	5.699.115.961	APBD Kota	Renja	100%	5.723.043.919
	2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji	Kota Banjar	54 orang	5.696.329.383	APBD Kota	Renja	54 orang	5.720.245.641
	2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	12 dokumen	-	APBD Kota	Renja	12 dokumen	-
	2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	2.786.578	APBD Kota	Renja	2 dokumen	2.798.277



	2	15	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Banjar	2 dokumen	-	APBD Kota	Renja	2 dokumen	-
	2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	30.410.089	APBD Kota	Renja	100%	30.474.691
	2	15	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diasuransikan	Kota Banjar	5 unit	30.410.089	APBD Kota	Renja	5 unit	30.474.691
	2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	-	APBD Kota	Renja	1 dokumen	-
	2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	-	APBD Kota	Renja	100%	-
	2	15	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Banjar	12 dokumen	-	APBD Kota	Renja	12 dokumen	-
	2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	214.639.473	APBD Kota	Renja	100%	215.095.450
	2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjar	118 stel	153.819.296	APBD Kota	Renja	118 stel	154.146.068
	2	15	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Banjar	2 dokumen	-	APBD Kota	Renja	2 dokumen	-
	2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	6 orang	60.820.177	APBD Kota	Renja	6 orang	60.949.383



	2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	482.757.114	APBD Kota	Renja	100%	483.782.677
	2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banjar	50 jenis	5.068.348	APBD Kota	Renja	50 jenis	5.079.115
	2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Banjar	10 jenis	107.364.338	APBD Kota	Renja	10 jenis	107.592.421
	2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Banjar	10 jenis	39.180.358	APBD Kota	Renja	10 jenis	39.263.592
	2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banjar	100 buah	7.855.940	APBD Kota	Renja	100 buah	7.872.629
	2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	100 set	61.206.385	APBD Kota	Renja	100 set	61.336.411
	2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjar	360 buku	12.164.035	APBD Kota	Renja	360 buku	12.189.877
	2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjar	12 bulan	25.341.740	APBD Kota	Renja	12 bulan	25.395.576
	2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kota Banjar	12 bulan	201.102.377	APBD Kota	Renja	12 bulan	204.535.970
	2	15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	20.473.592	APBD Kota	Renja	2 dokumen	20.517.086
	2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjar	100%	71.673.031	APBD Kota	Renja	100%	71.825.292



	2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	1 unit	-	APBD Kota	Renja	1 unit	
	2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	1 unit	40.197.575	APBD Kota	Renja	1 unit	40.282.971
	2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kota Banjar	10 unit	31.475.455	APBD Kota	Renja	10 unit	31.542.321
	2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	100%	1.476.961.233	APBD Kota	Renja	100%	1.480.098.870
	2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	500 buah	5.048.075	APBD Kota	Renja	500 buah	5.058.799
	2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	12 bulan	328.226.222	APBD Kota	Renja	12 bulan	328.923.501
	2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	816 orang/bulan	1.143.686.937	APBD Kota	Renja	816 orang / bulan	1.146.116.570
	2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	100%	510.341.092	APBD Kota	Renja	100%	511.425.254
	2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	20 unit	339.680.689	APBD Kota	Renja	20 unit	340.402.302
	2	15	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Banjar	10 unit	5.068.348	APBD Kota	Renja	10 unit	5.079.115



	2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	20 unit	18.793.435	APBD Kota	Renja	20 unit	18.833.359
	2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Banjar	1 unit	146.798.620	APBD Kota	Renja	1 unit	147.110.477
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								Persentase sarana dan prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh		48,53%				48,87%	
Meningkatnya Keselamatan Pengguna Jalan								Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji berkala		100%				100%	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.356.651.125				8.404.467.616
	2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	-	APBD Kota	Renja	100%	
	2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	1 dokumen	-	APBD Kota	Renja	1 dokumen	
	2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Kota Banjar	1 dokumen	-	APBD Kota	Renja	1 dokumen	



	2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	7.186.188.223	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	100%	7.201.454.797
	2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	5 unit	6.694.437.148	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	5 unit	6.708.658.723
	2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	Kota Banjar	116 unit	491.751.405	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	116 unit	492.796.075
	2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Banjar	100%	60.820.177	APBD Kota	Renja	100%	60.949.383
	2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Banjar	4 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	4 kali	30.474.691
	2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	2 dokumen	30.410.089	APBD Kota	Renja	2 dokumen	30.474.691
	2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelayanan uji berkala	Kota Banjar	100%	209.347.104	APBD Kota	Renja	100%	209.791.838



	2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi	Kota Banjar	1500 unit	30.410.089	APBD Kota	Renja	1500 unit	30.474.691
	2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjar	1500 buah	57.296.661	APBD Kota	Renja	1500 buah	57.418.382
	2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Kota Banjar	7 unit	121.640.354	APBD Kota	Renja	7 unit	121.898.765
	2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	839.065.025	APBD Kota	Renja	100%	840.847.524
	2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	12 kali	152.050.443	APBD Kota	Renja	12 kali	152.373.457
	2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	6 kali	651.536.146	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	6 kali	652.920.261
	2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	1 kali	35.478.437	APBD Kota	Renja	1 kali	35.553.807
	2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	-	APBD Kota	Renja	100%	-



	2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang memiliki kompetensi	Kota Banjar	1 orang	-	APBD Kota	Renja	1 orang	
	2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen Penilaian Hasil Andalalin	Kota Banjar	4 dokumen		APBD Kota	Renja	4 dokumen	
	2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Banjar	4 dokumen		APBD Kota	Renja	4 dokumen	
	2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Banjar	100%	60.820.177	APBD Kota	Renja	100%	60.949.383
	2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	2 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	2 kali	30.474.691
	2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Banjar	1 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	1 kali	30.474.691
	2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	30.410.089	APBD Kota	Renja	100%	30.474.691



2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	4 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	4 kali	30.474.691
JUMLAH USULAN MUSRENBANG (1)										4,834,676,879				4,754,092,934
JUMLAH USULAN RENJA (2)										11,232,888,260				11,306,183,816
JUMAH USULAN POKIR (3)										831,564,423				874,753,100
JUMLAH TOTAL (1+2+3)										16,899,129,562				16,935,029,851



Rincian peruntukkan kebutuhan dana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Urusan Bidang Perhubungan, dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp.
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 7.186.188.553,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 60.820.177,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 209.347.104,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 839.065.025,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

6. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 1 (satu)



- Kebutuhan Dana :
- APBD KOTA sebesar Rp. -,-
- APBD PROVINSI sebesar Rp. -
- APBN sebesar Rp. -

7. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
- APBD KOTA sebesar Rp. 60.820.177,-
- APBD PROVINSI sebesar Rp. -
- APBN sebesar Rp. -

8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 1 (satu)
- Kebutuhan Dana :
- APBD KOTA sebesar Rp. 30.410.089,-
- APBD PROVINSI sebesar Rp. -
- APBN sebesar Rp. -

b. Non Urusan (Beban Tetap/ Rutin), dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Jumlah Sub Kegiatan : 7 (tujuh)
- Kebutuhan Dana :
- APBD KOTA sebesar Rp. 26.580.445,-
- APBD PROVINSI sebesar Rp. -
- APBN sebesar Rp. -

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
- APBD KOTA sebesar Rp. 5.699.115.961,-
- APBD PROVINSI sebesar Rp. -
- APBN sebesar Rp. -

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Jumlah Sub Kegiatan : 1 (satu)
- Kebutuhan Dana :
- APBD KOTA sebesar Rp. 30.410.089,-
- APBD PROVINSI sebesar Rp. -



- APBN sebesar Rp. -
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 214.639.473,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 9 (sembilan)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 482.757.114,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 71.673.031,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
 7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 1.476.961.233,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 4 (empat)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 510.341.092,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dan RPJMD Kota Banjar. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2024 adalah sebanyak : 2 (dua) program, 16 (delapan belas) kegiatan, dan 47 (lima puluh lima) sub kegiatan dengan nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.811.000.000,- (*tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah.



TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJAR
TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Lembar dari

Sasaran	Berdasarkan Permendagri 90/2019 (Nomenklatur Baru)								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
	Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan								Nilai LKIP		62,03				62,03	
								LKD sesuai SAP		1 dok				1 dok	
	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjar	100%	8.512.478.437			100%	8.530.562.234
	2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	26.580.445	APBD Kota	Renja	100%	26.636.912
	2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjar	2 dokumen	8.055.632	APBD Kota	Renja	2 dokumen	8.072.746
	2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	2.685.211	APBD Kota	Renja	1 dokumen	2.690.915



	2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	2.830.166	APBD Kota	Renja	1 dokumen	2.836.178
	2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	1.968.546	APBD Kota	Renja	1 dokumen	1.972.728
	2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	2.698.389	APBD Kota	Renja	1 dokumen	2.704.121
	2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	4.190.510	APBD Kota	Renja	2 dokumen	4.208.104
	2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjar	4 dokumen	4.151.991	APBD Kota	Renja	4 dokumen	4.169.423
	2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	5.699.115.961	APBD Kota	Renja	100%	5.723.043.919
	2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji	Kota Banjar	54 orang	5.696.329.383	APBD Kota	Renja	54 orang	5.720.245.641
	2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjar	12 dokumen	-	APBD Kota	Renja	12 dokumen	-
	2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	2.786.578	APBD Kota	Renja	2 dokumen	2.798.277
	2	15	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Banjar	2 dokumen	-	APBD Kota	Renja	2 dokumen	-



	2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	30.410.089	APBD Kota	Renja	100%	30.474.691
	2	15	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diasuransikan	Kota Banjar	5 unit	30.410.089	APBD Kota	Renja	5 unit	30.474.691
	2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banjar	1 dokumen	-	APBD Kota	Renja	1 dokumen	-
	2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	-	APBD Kota	Renja	100%	-
	2	15	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Banjar	12 dokumen	-	APBD Kota	Renja	12 dokumen	-
	2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	214.639.473	APBD Kota	Renja	100%	215.095.450
	2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjar	118 stel	153.819.296	APBD Kota	Renja	118 stel	154.146.068
	2	15	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Banjar	2 dokumen	-	APBD Kota	Renja	2 dokumen	-
	2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjar	6 orang	60.820.177	APBD Kota	Renja	6 orang	60.949.383
	2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banjar	100%	482.757.114	APBD Kota	Renja	100%	483.782.677



	2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banjar	50 jenis	5.068.348	APBD Kota	Renja	50 jenis	5.079.115
	2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Banjar	10 jenis	107.364.338	APBD Kota	Renja	10 jenis	107.592.421
	2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Banjar	10 jenis	39.180.358	APBD Kota	Renja	10 jenis	39.263.592
	2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banjar	100 buah	7.855.940	APBD Kota	Renja	100 buah	7.872.629
	2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjar	100 set	61.206.385	APBD Kota	Renja	100 set	61.336.411
	2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjar	360 buku	12.164.035	APBD Kota	Renja	360 buku	12.189.877
	2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelaksanaan fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Banjar	12 bulan	25.341.740	APBD Kota	Renja	12 bulan	25.395.576
	2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kota Banjar	12 bulan	201.102.377	APBD Kota	Renja	12 bulan	204.535.970
	2	15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banjar	2 dokumen	20.473.592	APBD Kota	Renja	2 dokumen	20.517.086
	2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjar	100%	71.673.031	APBD Kota	Renja	100%	71.825.292
	2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	1 unit	-	APBD Kota	Renja	1 unit	



	2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjar	1 unit	40.197.575	APBD Kota	Renja	1 unit	40.282.971
	2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kota Banjar	10 unit	31.475.455	APBD Kota	Renja	10 unit	31.542.321
	2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	100%	1.476.961.233	APBD Kota	Renja	100%	1.480.098.870
	2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banjar	500 buah	5.048.075	APBD Kota	Renja	500 buah	5.058.799
	2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjar	12 bulan	328.226.222	APBD Kota	Renja	12 bulan	328.923.501
	2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjar	816 orang / bulan	1.143.686.937	APBD Kota	Renja	816 orang / bulan	1.146.116.570
	2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banjar	100%	510.341.092	APBD Kota	Renja	100%	511.425.254
	2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjar	20 unit	339.680.689	APBD Kota	Renja	20 unit	340.402.302
	2	15	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Banjar	10 unit	5.068.348	APBD Kota	Renja	10 unit	5.079.115
	2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjar	20 unit	18.793.435	APBD Kota	Renja	20 unit	18.833.359



	2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Banjar	1 unit	146.798.620	APBD Kota	Renja	1 unit	147.110.477
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								Persentase sarana dan prasarana perhubungan penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh		48,53%				48,87%	
Meningkatnya Keselamatan Pengguna Jalan								Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji berkala		100%				100%	
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				8.356.651.125				8.404.467.616
	2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Cakupan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	-	APBD Kota	Renja	100%	
	2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	1 dokumen	-	APBD Kota	Renja	1 dokumen	
	2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Kota Banjar	1 dokumen	-	APBD Kota	Renja	1 dokumen	



	2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	7.186.188.223	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	100%	7.201.454.797
	2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	5 unit	6.694.437.148	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	5 unit	6.708.658.723
	2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang di Rehabilitasi dan di Pelihara	Kota Banjar	116 unit	491.751.405	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	116 unit	492.796.075
	2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Banjar	100%	60.820.177	APBD Kota	Renja	100%	60.949.383
	2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Banjar	4 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	4 kali	30.474.691
	2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	2 dokumen	30.410.089	APBD Kota	Renja	2 dokumen	30.474.691
	2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelayanan uji berkala	Kota Banjar	100%	209.347.104	APBD Kota	Renja	100%	209.791.838



	2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang teregistrasi	Kota Banjar	1500 unit	30.410.089	APBD Kota	Renja	1500 unit	30.474.691
	2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjar	1500 buah	57.296.661	APBD Kota	Renja	1500 buah	57.418.382
	2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Kota Banjar	7 unit	121.640.354	APBD Kota	Renja	7 unit	121.898.765
	2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	839.065.025	APBD Kota	Renja	100%	840.847.524
	2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	12 kali	152.050.443	APBD Kota	Renja	12 kali	152.373.457
	2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	6 kali	651.536.146	APBD Kota	Musrenbang, Pokir, Renja	6 kali	652.920.261
	2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	1 kali	35.478.437	APBD Kota	Renja	1 kali	35.553.807
	2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	-	APBD Kota	Renja	100%	-



	2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang memiliki kompetensi	Kota Banjar	1 orang	-	APBD Kota	Renja	1 orang	
	2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen Penilaian Hasil Andalalin	Kota Banjar	4 dokumen		APBD Kota	Renja	4 dokumen	
	2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Banjar	4 dokumen		APBD Kota	Renja	4 dokumen	
	2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Banjar	100%	60.820.177	APBD Kota	Renja	100%	60.949.383
	2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	2 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	2 kali	30.474.691
	2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Banjar	1 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	1 kali	30.474.691
	2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	100%	30.410.089	APBD Kota	Renja	100%	30.474.691



2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kota Banjar	4 kali	30.410.089	APBD Kota	Renja	4 kali	30.474.691
JUMLAH USULAN MUSRENBANG (1)										12200000000				4,754,092,934
JUMLAH USULAN RENJA (2)										11,232,888,260				11,306,183,816
JUMAH USULAN POKIR (3)										831,564,423				874,753,100
JUMLAH TOTAL (1+2+3)										16,899,129,562				16,935,029,851



Rincian peruntukkan kebutuhan dana tersebut adalah sebagai berikut :

c. Urusan Bidang Perhubungan, dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

9. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp.
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

10. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 7.186.188.553,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

11. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 60.820.177,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

12. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 209.347.104,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -

13. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

- Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
- Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 839.065.025,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -



14. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota
 - Jumlah Sub Kegiatan : 1 (satu)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. -,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -
 15. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/ Kota
 - Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 60.820.177,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -
 16. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Jumlah Sub Kegiatan : 1 (satu)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 30.410.089,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -
- d. Non Urusan (Beban Tetap/ Rutin), dilaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 7 (tujuh)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 26.580.445,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -
 10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 5.699.115.961,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -
 11. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- Jumlah Sub Kegiatan : 1 (satu)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 30.410.089,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. -
 - APBN sebesar Rp. -
12. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Jumlah Sub Kegiatan : 2 (dua)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 214.639.473,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Jumlah Sub Kegiatan : 9 (sembilan)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 482.757.114,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
14. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 71.673.031,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
15. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Jumlah Sub Kegiatan : 3 (tiga)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 1.476.961.233,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Jumlah Sub Kegiatan : 4 (empat)
 - Kebutuhan Dana :
 - APBD KOTA sebesar Rp. 510.341.092,-
 - APBD PROVINSI sebesar Rp. –
 - APBN sebesar Rp. -



BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dibuat mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2024. Renja disusun tidak terlepas dari dokumen Renstra dan RKPD dimana program/ kegiatan yang dilaksanakan harus selalu sejalan. Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjar melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Dari hasil analisis kebutuhan tahun 2023, terdapat kebutuhan dana sebesar Rp.16.773.302.250,- (*enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dengan Sumber Dana dari APBD Kota.

Evaluasi capaian Kinerja yang telah dibahas pada Bab sebelumnya mencerminkan bahwa masih ada beberapa kegiatan yang belum terdani sesuai kebutuhan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pagu indikatif yang tertuang di Renstra, sehingga mempengaruhi target capaian kinerja. Untuk Program/Kegiatan yang belum tercapai capaian kinerjanya akan di usulkan kembali pada Anggaran Perubahan atau pada Anggaran Tahun berikutnya sehingga capaian kinerja pada akhir Renstra akan tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana



Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, seluruh aparatur Dinas Perhubungan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2024.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Besar harapan kami, dengan tersusunnya Renja Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, sarana peningkatan kinerja Dinas dan dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di tahun berikutnya.

Banjarn, 14 Maret 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarn,



ASEP SUTARNO, S.H., M.Si.
Pembina IV/A
NIP. 19680805 200604 1 008

